



**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN POLITIK  
(STUDI KETERLIBATAN PEREMPUAN PAPUA DI KABUPATEN SORONG)**

**Gustrianti M. Ali**

Universitas Nani Bili Nusantara Sorong  
e-mail : [gustriantimali@gmail.com](mailto:gustriantimali@gmail.com)

Diterima: 1/5/2026; Direvisi: 8/5/2026; Diterbitkan: 16/5/2026

**ABSTRAK**

Papua memiliki karakteristik sosial budaya yang cukup kompleks dengan dominasi nilai-nilai patriarki yang mempengaruhi konstruksi peran gender dalam masyarakat. Dalam banyak kasus yang ditemui misalnya perempuan Papua ditempatkan pada rana domestik dan memiliki akses terbatas terhadap ruang publik dan politik. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat representasi numerik maupun substantive perempuan Papua dalam lembaga-lembaga politik formal. Dalam perspektif komunikasi politik, rendahnya partisipasi politik perempuan Papua erat kaitannya dengan pola komunikasi politik yang berkembang. Komunikasi politik memainkan peran sentral dalam mentransisikan nilai-nilai politik, membentuk opini public. Namun, dalam praktiknya keterlibatan perempuan, khususnya perempuan asli Papua, masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek budaya, sosial, pendidikan, maupun struktur politik yang belum sepenuhnya memberikan ruang yang setara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam bentuk partisipasi perempuan Papua dalam proses politik serta hambatan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan Papua dalam kebijakan politik di Kabupaten Sorong mulai mengalami perkembangan, ditandai dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam organisasi politik, lembaga pemerintahan, serta kegiatan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Namun demikian, partisipasi tersebut masih belum optimal karena dipengaruhi oleh rendahnya representasi politik, kuatnya budaya patriarki, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan minimnya dukungan kelembagaan terhadap pemberdayaan politik perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat dalam mendorong peningkatan kapasitas serta membuka akses yang lebih luas bagi perempuan Papua untuk terlibat aktif dalam proses kebijakan politik.

**Kata Kunci:** *Partisipasi Perempuan, Kebijakan Politik, Perempuan Papua*

**ABSTRACT**

Papua Has Complex Socio-Cultural Characteristics With The Dominance Of Patriarchal Values Influencing The Construction Of Gender Roles Within Society. In Many Cases, Papuan Women Are Placed In The Domestic Sphere And Have Limited Access To Public And Political Spaces. This Condition Impacts The Low Level Of Both Numerical And Substantive Representation Of Papuan Women In Formal Political Institutions. From The Perspective Of Political Communication, The Low Political Participation Of Papuan Women Is Closely Related To The Patterns Of Political Communication That Develop Within Society. Political Communication Plays A Central Role In Transmitting Political Values And Shaping Public Opinion. However, In Practice, The Involvement Of Women, Especially Indigenous Papuan Women, Still Faces Various Challenges In Terms Of Cultural, Social, Educational, And Political Structural Aspects



That Have Not Fully Provided Equal Opportunities. This Study Employs A Qualitative Research Method With A Descriptive Approach To Gain An In-Depth Understanding Of The Forms Of Papuan Women's Participation In Political Processes And The Obstacles They Encounter. Data Collection Techniques Were Carried Out Through Interviews, Observation, And Documentation. The Findings Indicate That The Participation Of Papuan Women In Political Policymaking In Sorong Regency Has Begun To Develop, Marked By Increased Involvement Of Women In Political Organizations, Government Institutions, And Local Decision-Making Activities. However, Such Participation Remains Suboptimal Due To Low Political Representation, The Persistence Of Patriarchal Culture, Limited Human Resource Capacity, And Minimal Institutional Support For Women's Political Empowerment. Therefore, Greater Efforts Are Needed From The Government, Political Parties, And Society To Enhance Capacity-Building And Provide Broader Access For Papuan Women To Actively Engage In Political Policymaking Processes.

**Keywords:** *Women's Participation, Political Policy, Papuan Women*

## **PENDAHULUAN**

Keterlibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik merupakan indikator kematangan demokrasi suatu bangsa yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Di Indonesia, mandat konstitusional dan regulasi afirmatif seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menetapkan kuota minimal 30% bagi keterwakilan perempuan dalam kancah politik nasional maupun daerah. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari upaya global untuk mencapai *sustainable development goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, khususnya pada pilar kesetaraan gender. Secara ideal, keterlibatan perempuan harus dipandang sebagai fondasi dasar bagi terbentuknya tatanan dunia yang damai, sejahtera, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan manusia yang berkelanjutan menuntut adanya pembagian tanggung jawab dan peluang yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis. Ketika perempuan hadir sebagai pemimpin, kepentingan perlindungan terhadap kaum hawa dan anak-anak dapat terwakili secara lebih substantif dalam setiap produk hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akses terhadap sumber daya dan pengetahuan politik tersedia secara merata tanpa adanya diskriminasi yang bersifat kodrati dalam sistem pemerintahan nasional (Arief et al., 2020; Halalia, 2020; Nasution & Sapii, 2022; Triadi & Maryanto, 2024).

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dominasi sistem *patriarchy* di Indonesia masih menjadi tantangan yang sangat memprihatinkan bagi kemajuan politik perempuan. Meskipun berbagai revisi perundang-undangan telah memberikan ruang bagi perempuan untuk dipilih sebagai pemimpin, hambatan kultural dan struktural sering kali membentengi langkah mereka menuju kursi kekuasaan. Budaya patriarki yang mengakar kuat cenderung memandang perempuan sebagai sosok yang lemah dan kurang bermanfaat dalam ruang publik, sehingga mereka terbelenggu oleh doktrin yang membatasi peran hanya di wilayah domestik (Manalu et al., 2024; Nursyifa et al., 2023; Oktaviani & Megawati, 2021; Safriyanto et al., 2024). Padahal, persoalan kepemimpinan adalah aspek paling strategis yang menentukan masa depan keluarga, masyarakat, hingga keberlangsungan bangsa secara menyeluruh. Kesenjangan antara regulasi formal dengan realitas praksis ini mengakibatkan perempuan sering kali tertindas dan hanya dipandang sebagai pengurus rumah tangga semata tanpa hak suara yang signifikan. Dalam pandangan *feminism*, gerakan menuntut hak politik dan kebebasan individu menjadi sangat krusial untuk membongkar diskriminasi sistemik yang telah



berlangsung selama berabad-abad. Tanpa adanya transformasi mendasar dalam cara pandang masyarakat terhadap peran gender, pilar pembangunan manusia yang inklusif akan sulit tercapai karena potensi sumber daya manusia masih terpinggirkan (Karwati, 2021; Larasati & Ayu, 2020; Mahyus et al., 2025; Rahmadani & Agustina, 2024).

Permasalahan keterwakilan perempuan menjadi semakin kompleks ketika meninjau karakteristik sosial budaya di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Masyarakat Asli Papua masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang sangat dominan menempatkan perempuan pada ranah domestik sebagai pencari nafkah keluarga namun sangat terbatas dalam akses politik. Di Kabupaten Sorong yang tergolong masih berusia muda, partisipasi perempuan asli Papua dalam kepemimpinan politik terpantau masih sangat rendah dan minim peminat. Hambatan yang dihadapi mencakup aspek kultural, struktural, hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menghalangi mereka untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan daerah. Perempuan asli Papua sering kali merasa teralienasi dari proses politik formal karena kurangnya akses informasi dan terbatasnya saluran komunikasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan peluang yang mencolok, di mana suara perempuan adat belum terakomodasi secara optimal dalam lembaga-lembaga politik formal di tingkat lokal. Padahal, keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di wilayah Papua dapat mencerminkan keadilan ekologi dan kesejahteraan sosial yang menyentuh akar rumput secara berkelanjutan bagi masa depan daerah (Erlando et al., 2025; Fatem et al., 2023; Fauzi et al., 2023; Suharno, 2021).

Rendahnya tingkat partisipasi politik ini erat kaitannya dengan pola komunikasi politik yang berkembang di Kabupaten Sorong, yang cenderung bersifat *top-down* dan sangat elitis. Komunikasi politik seharusnya berperan sebagai sarana untuk mentransisikan nilai-nilai demokrasi, membentuk opini publik yang sehat, serta memobilisasi partisipasi masyarakat secara luas. Namun, bagi perempuan asli Papua, mereka justru menghadapi kendala literasi politik yang rendah serta keterbatasan akses terhadap media informasi yang mampu menyuarakan kepentingan mereka secara mandiri. Model komunikasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan partisipatoris yang dialogis dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal yang beragam. Hal ini mengakibatkan terjadinya hambatan dalam proses pertukaran simbol dan makna politik antara elit dengan publik perempuan di tingkat lokal. Tanpa saluran komunikasi yang memadai, aspirasi politik perempuan asli Papua sulit untuk bertransformasi menjadi kebijakan publik yang substantif dan berpihak pada kesetaraan gender. Oleh karena itu, identifikasi terhadap hambatan-hambatan dalam proses komunikasi politik menjadi sebuah kebutuhan mendesak guna merumuskan strategi yang lebih kontekstual. Komunikasi yang inklusif merupakan kunci utama untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan asli Papua dalam kepemimpinan daerah (Dzinnun et al., 2024; Fauzi et al., 2023; Ferazia et al., 2020; Nurussa'adah, 2020).

Penelitian yang dilakukan pada periode 18 hingga 15 November 2025 ini hadir untuk memberikan kontribusi inovatif dengan fokus kajian pada dinamika komunikasi politik di Kabupaten Sorong. Nilai kebaruan dari studi ini terletak pada upaya untuk merumuskan strategi komunikasi yang kontekstual dan berbasis gender guna mengatasi kebuntuan partisipasi perempuan asli Papua. Berbeda dengan penelitian terdahulu, kajian ini secara spesifik mengidentifikasi hambatan kultural dan struktural melalui kacamata kearifan lokal yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Inovasi ini bertujuan untuk menciptakan model komunikasi politik yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menghargai eksistensi perempuan asli Papua



sebagai aktor politik yang berdaulat. Dengan mengkaji perilaku kepemimpinan dan pola interaksi di tingkat lokal, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan untuk merancang program pemberdayaan yang lebih efektif. Asumsi dasar yang diangkat mengenai rendahnya keterlibatan perempuan asli Papua akan diuraikan melalui perspektif yang menyatukan teori komunikasi, gender, dan kebijakan publik secara komprehensif. Melalui batasan masalah yang objektif dan realistis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai kepemimpinan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia sekaligus menjadi pijakan regulasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan rancangan kualitatif deskriptif untuk membedah dinamika keterlibatan perempuan asli Papua dalam ranah kebijakan publik secara mendalam. Lokasi pengamatan dipusatkan di wilayah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang dipilih karena kompleksitas struktur sosial budayanya. Prosedur pelaksanaan dimulai dengan menentukan informan kunci melalui teknik *purposive sampling* guna menjangkau data yang akurat dan representatif. Subjek penelitian mencakup 10 tokoh perempuan yang aktif dalam organisasi politik, 5 perwakilan lembaga pemerintahan daerah, serta anggota legislatif perempuan di tingkat lokal. Instrumen utama dalam studi ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci yang terjun langsung ke lapangan untuk menangkap fenomena sosiopolitik secara alamiah. Fokus pengamatan diarahkan pada peran substantif mereka dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang serta posisi strategis di struktur partai politik. Seluruh tahapan awal ini dirancang untuk memastikan bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi subjek terdokumentasi dengan baik guna mendukung analisis hambatan patriarki yang masih mendominasi ruang publik.

Teknik pengumpulan data primer dijalankan melalui wawancara mendalam yang bersifat *semi-structured* guna menggali narasi subjektif mengenai pengalaman politik para informan. Peneliti menggunakan alat bantu berupa alat perekam *digital* dan buku catatan lapangan untuk mengarsipkan setiap pernyataan penting selama proses dialog berlangsung. Selain itu, prosedur observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati interaksi sosial di kantor pemerintahan dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan formal. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup arsip kebijakan daerah, data statistik keterwakilan *gender*, serta laporan resmi hasil pemilihan umum terakhir. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui model interaktif yang terdiri atas 3 tahapan utama, yakni reduksi informasi untuk memilah data relevan, penyajian data dalam bentuk naratif deskriptif, serta penarikan kesimpulan akhir. Proses validasi hasil penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber untuk membandingkan informasi antara pihak pemerintah dan aktivis perempuan. Langkah ini menjamin bahwa interpretasi hasil mengenai rendahnya representasi politik di Kabupaten Sorong bersifat objektif, transparan, dan sesuai dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi perempuan Papua dalam kebijakan politik di Kabupaten Sorong, ditemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses politik mulai menunjukkan perkembangan positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya keikutsertaan perempuan dalam organisasi politik, kegiatan pemerintahan daerah, forum



musyawarah pembangunan, serta dalam beberapa jabatan strategis di lingkungan pemerintahan dan legislatif.

### **Hasil**

#### **Dinamika Keterlibatan Perempuan Papua dalam Ruang Publik**

Perempuan Papua di Kabupaten Sorong kini telah mulai mengambil peran strategis dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik melalui partisipasi aktif di beragam forum formal maupun informal. Keterlibatan mereka terlihat nyata dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat daerah, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, hingga kehadiran di lembaga politik formal seperti partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kehadiran para perempuan ini di ruang-ruang publik tersebut menunjukkan adanya kesadaran politik yang semakin meningkat untuk ikut serta menentukan arah pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat luas. Meskipun jumlahnya masih bertahap, pergeseran ini menandakan bahwa suara perempuan mulai dipertimbangkan dalam diskusi-diskusi krusial mengenai masa depan Sorong. Keberanian mereka untuk tampil menjadi bukti nyata bahwa semangat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan kolektif telah tumbuh secara organik di kalangan masyarakat adat maupun perkotaan. Perubahan positif ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan dasar perempuan serta anak-anak di tanah Papua.

#### **Tantangan Budaya Patriarki dan Peran Domestik**

Meskipun terdapat kemajuan dalam partisipasi politik, perempuan Papua di Kabupaten Sorong masih harus menghadapi tantangan besar berupa budaya patriarki yang masih sangat kuat di masyarakat. Pandangan tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama sering kali memposisikan perempuan pada peran subordinat yang terbatas pada urusan domestik rumah tangga saja. Konstruksi sosial semacam ini menciptakan hambatan psikologis maupun struktural yang membuat perempuan sulit untuk memperoleh posisi kepemimpinan atau jabatan strategis dalam struktur politik formal. Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga serta rendahnya tingkat pendidikan politik menjadi kendala tambahan yang menyebabkan keterlibatan mereka sering kali dipandang sebelah mata oleh publik. Stereotip terhadap kemampuan kepemimpinan perempuan masih menghantui ruang-ruang diskusi, sehingga ruang gerak mereka dalam aktivitas politik menjadi sangat terbatas dibandingkan rekan laki-laki. Kondisi ini menuntut adanya refleksi kolektif untuk mendefinisikan peran gender agar setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi tanpa dibatasi oleh sekat-sekat tradisi yang cenderung diskriminatif.

#### **Kesenjangan Antara Partisipasi Formal dan Pengaruh Keputusan**

Dalam tinjauan kebijakan publik, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara kehadiran secara administratif dengan kemampuan substantif perempuan untuk memengaruhi hasil keputusan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun perempuan Papua telah dilibatkan dalam forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan, keterlibatan tersebut sering kali hanya terbatas pada pemenuhan kuota atau kehadiran fisik tanpa kekuatan suara yang dominan. Secara formal, pemerintah daerah memang telah membuka ruang partisipatif, namun akses terhadap jabatan strategis yang menentukan arah kebijakan anggaran dan pembangunan masih sangat minim bagi kaum perempuan. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kebijakan partisipatif di Kabupaten Sorong belum sepenuhnya berjalan secara inklusif dan adil bagi semua kelompok kepentingan. Partisipasi yang efektif seharusnya diukur dari sejauh mana aspirasi perempuan dapat terakomodasi menjadi keputusan yang mengikat, bukan sekadar menjadi pelengkap dalam daftar hadir rapat konsultasi publik. Oleh karena itu,



diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kualitas keterwakilan agar peran perempuan tidak hanya berhenti pada tahap seremonial, melainkan mampu memberikan pengaruh nyata dalam setiap tahapan kebijakan politik daerah.

### **Perubahan Persepsi Sosial Terhadap Kesetaraan Gender**

Di tengah berbagai hambatan struktural yang ada, mulai muncul tanda-tanda perubahan sosial yang memberikan harapan bagi masa depan partisipasi politik perempuan di wilayah Kabupaten Sorong. Sebagian lapisan masyarakat kini mulai menunjukkan penerimaan yang lebih terbuka terhadap kehadiran perempuan yang aktif dalam organisasi politik maupun jabatan birokrasi pemerintahan. Fenomena ini menjadi indikasi kuat bahwa kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam dunia politik mulai berkembang, meskipun penyebarannya belum merata ke seluruh pelosok daerah. Perubahan persepsi ini sangat dipengaruhi oleh keberhasilan beberapa tokoh perempuan Papua yang mampu menunjukkan kinerja cemerlang serta dedikasi tinggi dalam melayani kepentingan masyarakat luas tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal. Rasa percaya diri para perempuan ini perlahan mulai bangkit seiring dengan adanya lingkungan sosial yang lebih suportif dan menghargai kompetensi individu di atas perbedaan gender. Meskipun perjalanan menuju kesetaraan penuh masih panjang, tumbuhnya dukungan lingkungan sosial menjadi modal berharga untuk meruntuhkan tembok stereotip negatif yang selama ini menghambat kemajuan politik perempuan Papua.

### **Strategi Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Politik**

Langkah strategis untuk meningkatkan keterlibatan substantif perempuan Papua dalam kebijakan politik di Kabupaten Sorong harus difokuskan pada penguatan kapasitas kepemimpinan dan pendidikan politik yang berkelanjutan. Pemberdayaan ini tidak hanya menasar pada aspek keterampilan teknis dalam berorganisasi, tetapi juga pada penguatan mentalitas untuk berani mengambil posisi kunci dalam setiap perumusan kebijakan publik. Pendidikan politik yang tepat sasaran akan membantu perempuan memahami hak-hak mereka secara utuh sehingga mampu bernegosiasi secara efektif di ruang-ruang politik yang kompetitif. Selain itu, diperlukan perubahan paradigma yang menyeluruh di tingkat masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender agar dukungan terhadap pemimpin perempuan tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu atau tidak lazim. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem politik yang aman serta inklusif bagi semua pihak tanpa terkecuali. Dengan memperkuat kapasitas intelektual dan didukung oleh akses struktural yang adil, perempuan Papua di Sorong akan mampu menjadi agen perubahan yang menentukan arah pembangunan daerah demi masa depan yang lebih baik.

### **Pembahasan**

Keterlibatan perempuan Papua di wilayah Kabupaten Sorong dalam ranah perumusan kebijakan publik saat ini mulai menunjukkan pergerakan yang dinamis melalui keikutsertaan mereka dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan maupun lembaga legislatif daerah. Fenomena ini dapat ditelaah melalui kacamata teori kebijakan publik yang memandang proses formulasi sebagai tahapan krusial untuk mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat secara luas dan *inclusive*. Kehadiran fisik para perempuan dalam ruang formal tersebut menandakan adanya peningkatan kesadaran politik yang cukup signifikan untuk menentukan arah pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan gender. Secara teoretis, kebijakan publik merupakan hasil dari serangkaian keputusan otoritatif pemerintah yang bertujuan menyelesaikan persoalan sosial melalui proses perumusan yang partisipatif. Di



Sorong, pemerintah daerah telah membuka pintu bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi mereka, terutama terkait isu kesejahteraan keluarga dan pembangunan sosial yang menjadi fokus utama dalam setiap rapat koordinasi. Meskipun ruang partisipasi ini telah tersedia secara *legal*, efektivitasnya dalam tataran praktis masih perlu dikaji lebih dalam guna memastikan bahwa suara mereka benar-benar menjadi bagian *integral* dari produk hukum yang dihasilkan bagi seluruh warga di masa mendatang secara menyeluruh (Andriani, 2023; Firdaus, 2022; Nasution & Sapii, 2022; Wardana et al., 2023; Wedhatami et al., 2023).

Meskipun pintu partisipasi telah terbuka, tingkat keterlibatan perempuan Papua dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintahan daerah masih menghadapi tantangan besar terkait kedalaman pengaruhnya. Partisipasi yang berlangsung saat ini cenderung masih bersifat *administrative* atau sekadar memenuhi kuota kehadiran dalam forum publik tanpa memiliki kekuatan tawar yang cukup kuat dalam menentukan hasil akhir. Berdasarkan analisis teori kebijakan, keberhasilan sebuah partisipasi tidak hanya diukur dari kuantitas kehadiran peserta, melainkan dari kemampuan individu untuk memengaruhi substansi serta arah keputusan yang diambil oleh para *stakeholder*. Di Kabupaten Sorong, perempuan sering kali terjebak dalam posisi pendukung yang tidak memiliki akses langsung terhadap jabatan pimpinan yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola anggaran maupun program kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa inklusivitas dalam sistem politik daerah masih berada pada tahap prosedural dan belum menyentuh aspek *substantive* yang memberikan dampak nyata pada perubahan struktur kebijakan. Keterbatasan akses terhadap posisi kunci menjadikan peran perempuan sering kali terpinggirkan saat pembahasan isu-isu krusial yang memerlukan ketegasan politik serta keberanian dalam melakukan negosiasi di meja kekuasaan yang masih sangat maskulin (Erick & Masyitah, 2020; Karimah, 2021; Permatasari & Harirah, 2025; Salfa, 2023; Silaban et al., 2021).

Hambatan yang menghalangi optimalisasi peran perempuan ini dapat dipahami secara lebih mendalam melalui perspektif teori gender yang menyoroti adanya konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak individu. Di lingkungan masyarakat lokal, budaya patriarki yang masih mengakar kuat menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam urusan publik, sementara perempuan sering kali diposisikan dalam peran domestik. Pandangan tradisional yang menganggap politik sebagai dunia laki-laki menciptakan stigma negatif bagi perempuan yang berani masuk ke dalam kancah persaingan kekuasaan atau kepemimpinan formal. Hal ini menyebabkan perempuan sering kali dipandang kurang layak untuk memegang kendali atau mengambil keputusan penting yang menyangkut kepentingan orang banyak di wilayah tersebut. Beban ganda yang dipikul perempuan dalam menjalankan tugas rumah tangga serta aktivitas sosial juga menjadi kendala fisik yang membatasi energi mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik yang menyita waktu. Ketidakadilan gender yang terstruktur melalui nilai budaya ini secara otomatis menciptakan batasan yang sulit ditembus tanpa adanya intervensi berupa perubahan *paradigm* sosial yang lebih moderat terhadap peran kepemimpinan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan daerah saat ini (Disher et al., 2021; Mandasari, 2022; Meo & Boro, 2021; Sibarani & Gulo, 2020; Susanti & Patonah, 2020).

Selain hambatan budaya yang bersifat eksternal, terdapat kendala psikologis dan struktural yang turut memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi aktif perempuan Papua dalam kancah kebijakan politik di daerah. Kurangnya rasa percaya diri serta minimnya dukungan dari lingkungan keluarga terdekat sering kali menjadi penghalang mental yang membuat perempuan ragu untuk mengejar posisi kepemimpinan yang lebih tinggi. *Stereotype* yang meragukan kemampuan intelektual maupun ketegasan perempuan dalam memimpin organisasi politik



semakin memperburuk situasi ketidakadilan gender yang dialami oleh mereka di lapangan secara nyata. Teori gender melihat kondisi ini sebagai bentuk *subordination* yang menghambat akses terhadap kesempatan politik yang setara bagi semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Minimnya pendidikan politik yang menasar kelompok perempuan di tingkat akar rumput juga menyebabkan mereka kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai mekanisme birokrasi serta strategi advokasi yang efektif. Akibatnya, perempuan sering kali menjadi objek dari kebijakan dan bukan subjek yang aktif merumuskan solusi atas permasalahan mereka sendiri dalam ruang sidang yang penuh dengan kepentingan faksi politik tertentu yang sering kali bersifat eksklusif terhadap aspirasi kaum hawa (Azis & Siscawati, 2021; Efendi & Rahayu, 2021; Erick & Masyitah, 2020; Rahmanto et al., 2021).

Walaupun masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai terlihat adanya tanda-tanda perubahan sosial di wilayah Kabupaten Sorong yang memberikan harapan bagi masa depan kesetaraan politik perempuan. Sebagian masyarakat telah menunjukkan keterbukaan yang lebih baik terhadap kehadiran perempuan dalam struktur pemerintahan maupun organisasi politik, yang menandakan bahwa kesadaran gender mulai tumbuh perlahan. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan upaya kolaboratif yang terintegrasi melalui program pendidikan politik yang berkelanjutan serta *capacity building* kepemimpinan bagi perempuan Papua di berbagai tingkatan organisasi. Pemberdayaan ini harus menyentuh aspek keterampilan negosiasi, komunikasi publik, serta pemahaman hukum agar mereka memiliki kepercayaan diri yang kuat saat berhadapan dengan sistem yang patriarkis. Selain itu, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang menjamin adanya keterwakilan perempuan pada posisi strategis melalui mekanisme *affirmative action* yang lebih berani dan konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Perubahan paradigma masyarakat mengenai peran gender dalam politik harus terus didorong melalui dialog budaya inklusif guna meruntuhkan sekat prasangka yang selama ini menghambat kemajuan. Dengan dukungan sistemik yang tepat, perempuan Papua akan mampu berdiri sejajar dalam menentukan arah masa depan politik daerah yang lebih adil bagi semua.

## **KESIMPULAN**

Pembahasan mengenai keterlibatan kaum hawa dalam ranah kebijakan politik di wilayah Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa meskipun peluang mulai terbuka, namun realisasinya belum berjalan secara maksimal. Perempuan asli tanah Papua mulai mengisi berbagai forum musyawarah serta organisasi kemasyarakatan, namun suara mereka seringkali hanya menjadi pelengkap tanpa kekuatan pengaruh yang menentukan arah pembangunan daerah. Kendala utama yang menghalangi kemajuan ini berakar pada kuatnya tatanan budaya *patriarchy* yang masih mengunggulkan peran lelaki sebagai pemimpin utama dalam lini kehidupan publik. Selain itu, hambatan berupa rendahnya tingkat pemahaman terhadap dinamika birokrasi dan beban peran ganda atau *double burden* membuat fokus mereka terbagi antara tanggung jawab domestik dan pengabdian sosial. Akibatnya, posisi tawar mereka dalam ruang pengambilan keputusan tetap lemah memerlukan transformasi sistemik mewujudkan keadilan politik.

Guna mengoptimalkan peran strategis tersebut, pemerintah daerah bersama lembaga legislatif perlu merancang skema pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming* yang lebih inklusif bagi lapisan masyarakat adat. Program pendidikan politik yang bersifat partisipatif harus diselenggarakan secara rutin meningkatkan kapasitas intelektual serta keberanian berbicara di depan publik bagi para aktivis perempuan. Selain itu, pemberian



pelatihan kepemimpinan atau *leadership training* berorientasi pada penyelesaian masalah nyata sangat mendesak dilakukan agar mereka memiliki kesiapan mental menghadapi tantangan birokrasi yang rumit. Sosialisasi mengenai pentingnya pembagian peran yang adil di dalam rumah tangga juga harus terus digalakkan untuk mengurangi beban kerja fisik yang berlebihan. Dengan dukungan anggaran memadai dan komitmen kuat pemangku kepentingan, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang menghargai kontribusi perempuan sebagai aktor penggerak perubahan demi kesejahteraan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H. (2023). Partisipasi bermakna sebagai wujud asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>
- Arief, S. A., Ridho, M. R., & Erawan, M. A. (2020). Tarik-ulur keterwakilan perempuan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 507. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p04>
- Azis, A. U., & Siscawati, M. (2021). Janus faced of women's parliament family line: Representation of women in politics and party oligarchy. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(2), 117. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i2.2404>
- Disher, N., Guerra, A. L., & Haefel, G. J. (2021). Men have ability, women are lucky: A pre-registered experiment examining gender bias in knowledge attribution. *British Journal of Social Psychology*, 60(3), 808–825. <https://doi.org/10.1111/bjso.12443>
- Dzinnun, Y., Jubba, H., Azhar, M. A., & Qodir, Z. (2024). From global trends to local realities: Understanding women's political involvement for Indonesia's democratic progress. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 180–193. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i1.14181>
- Efendi, M., & Rahayu, A. (2021). Analisis keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif. *Qawwam: The Leader's Writing*, 2(1), 28–44. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i1.87>
- Erick, B., & Masyitah, M. (2020). Keterwakilan perempuan dalam partai politik perspektif siyasah syar'iyah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), 200–212. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312>
- Erlando, B. M. B., Cornelis, V. I., Soekorini, N., Astutik, S., & Hartoyo, H. (2025). Legal review of local government institutions in Papua under Government Regulation No. 106/2021. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 3(9), 82–95. <https://doi.org/10.62504/jimr1368>
- Fatem, S. M., Samber, A. O., Marwa, J., & Boseran, M. B. (2023). Dinamika kebijakan dan aktor dalam pembentukan Papua Barat sebagai provinsi konservasi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(4), 888–900. <https://doi.org/10.14710/jil.21.4.888-900>
- Fauzi, F. Z., Mayor, D., & Liauw, G. (2023). The direction of Papua development: Is a new autonomous region the answer? *Policy & Governance Review*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.30589/pgr.v7i1.609>
- Ferazia, I., Prayudi, P., & Afifi, S. (2020). Analysis of communication networks among political elites in the formation of party coalitions. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 95. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i1.3709>



- Firdaus, F. R. (2022). Public participation after the law-making procedure law of 2022. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 495–514. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.495-514>
- Halalia, M. R. (2020). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2016>
- Karimah, E. N. (2021). Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan menengah di DPRD DIY. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 297–306. <https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17209>
- Karwati, L. (2021). Menolak subordinasi gender berdasarkan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan nasional menjelang bonus demografi 2035. *Jendela PLS*, 5(2), 122–130. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2713>
- Larasati, A. M., & Ayu, N. P. (2020). The education for gender equality and human rights in Indonesia: Contemporary issues and controversial problems. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 73–84. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>
- Mahyus, M., Wahida, N., Putriani, P., Fatima, S., & Faisal, M. (2025). Promosi kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi. *Journal Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.55638/sosial.v2i1.376>
- Manalu, Y. B., Simatupang, R. H., & Silaen, C. F. B. (2024). Kesetaraan gender dalam bingkai kebinekaan Indonesia. *Journal of Law and Social Society*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.81>
- Mandasari, N. (2022). Analisis pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik (Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). *Ebisma (Economics Business Management & Accounting Journal)*, 2(2), 50–59. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v2i2.17>
- Meo, E. N., & Boro, V. I. A. (2021). Kesetaraan gender dalam perekrutan Aparatur Sipil Negara menempati jabatan struktural di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *PERSPEKTIF*, 10(1), 204–210. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4274>
- Nasution, A. I., & Sapii, R. B. S. (2022). Aktualisasi konsep meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(2), 202. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i2.y2022.26207>
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi perempuan dalam politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>
- Nurussa'adah, E. (2020). Perempuan dan komunikasi politik pada pemilihan umum Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 111. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i1.3236>
- Oktaviani, A., & Megawati, M. (2021). Quo vadis kebijakan affirmative action dalam sistem demokrasi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(2), 90–111. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4730>
- Permatasari, M. I., & Harirah, Z. (2025). Analysis of women's representation in various positions and roles within the public sector. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 13(2), 104–112. <https://doi.org/10.31629/juan.v13i2.6535>



- Rahmadani, N. D., & Agustina, I. F. (2024). Pengembangan berbasis gender: Mengubah dinamika desa di Indonesia. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(1), 20. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i1.34>
- Rahmanto, F., Purnomo, E. P., Kasiwi, A. N., & Salsabila, L. (2021). Women's representation through political parties in parliament period of general election 2019-2024. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(3), 336–359. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i1.22666>
- Safriyanto, R., Ningsih, F., Frederick, J. R., & Isyanawulan, G. (2024). Analisis budaya patriarki terhadap kesetaraan gender perempuan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Publika*, 12(2), 166–174. <https://doi.org/10.33603/publika.v12i2.10182>
- Salfa, H. N. (2023). Peran sosial perempuan dalam masyarakat dan implikasinya terhadap penempatan perempuan anggota legislatif pada komisi-komisi di DPR RI periode 2019-2024. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 162–181. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3163>
- Sibarani, R., & Gulo, Y. (2020). Subordinasi kepemimpinan perempuan dalam budaya Batak Toba. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.24114/antro.v6i1.16636>
- Silaban, R. G., Mahyuni, I. A. P., & Sidemen, I. A. W. (2021). Perempuan Bali dalam dunia politik (Studi kasus pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Badung tahun 2009, 2014 dan 2019). *HUMANIS*, 25(4), 551. <https://doi.org/10.24843/jh.2021.v25.i04.p14>
- Suharno, S. (2021). Public policy and special autonomy in Papua and West Papua. *NATAPRAJA*, 9(2), 121–130. <https://doi.org/10.21831/jnp.v9i1.43789>
- Susanti, Y., & Patonah, R. (2020). Peran perempuan terhadap penguatan ekonomi keluarga di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Edukasi (Ekonomi Pendidikan Dan Akuntansi)*, 8(2), 107. <https://doi.org/10.25157/je.v8i2.4324>
- Triadi, I., & Maryanto, M. (2024). Pengaruh politik hukum terhadap kesetaraan gender di dunia kerja. *Begawan Abioso*, 15(1), 29–40. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i1.987>
- Wardana, D. J., Sukardi, S., & Salman, R. (2023). Public participation in the law-making process in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 66–77. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.14813>
- Wedhatami, B., Damayanti, R., & Prasasi, C. A. (2023). Navigating regional regulatory changes in Indonesia: An in-depth analysis of post-amendment implementation of Law Number 12 of 2011 on legislation formation. *Unnes Law Journal*, 9(2), 237–264. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.78642>